

# KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM DALAM PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

**Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si**

*Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Simalungun Tahun 2015-2017. Sumber data dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan dokumentasi melalui website [www.simalungunkab.bps.go.id](http://www.simalungunkab.bps.go.id), dan [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian ini adalah data sekunder. Hasil Penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dari tahun 2015-2017 selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Simalungun lebih baik kedepannya. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan mendorong pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, pelayanan kesehatan, pendidikan serta lapangan pekerjaan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan Ekonomi

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Desentralisasi merupakan bentuk otonomi daerah yang riil untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di daerah yang diharapkan dapat lebih merata. Prinsip otonomi daerah adalah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya atau dengan kata lain daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat dan dalam kewenangan ini daerah dapat membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan keikutsertaan pemberdayaan masyarakat yang tujuan utamanya adalah terjadinya peningkatan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Demi mewujudkan pembangunan ekonomi di daerah maka daerah otonom diberikan sumber anggaran dana yang terdiri atas pendapatan asli daerah dan dana perimbangan antara pusat dengan daerah. Pendapatan Asli Daerah atau yang lebih sering disingkat PAD menurut Badrudin (2011:99) adalah "Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi".

Desentralisasi pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali hasil pendapatan daerah dan melakukan alokasi mandiri untuk memprioritaskan dalam hal pembangunan, dengan harapan dapat memberikan pemerataan pembangunan di segala wilayah daerah dan pemerataan pembangunan ini bertujuan untuk terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Dana perimbangan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pembiayaan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang termasuk ke dalam dana perimbangan adalah dana alokasi umum, dana lokasi khusus dan dana bagi hasil. Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Djaenuri (2012:103) adalah dana bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dengan demikian akan terselenggara jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Peningkatan pendapatan asli daerah dan Dana Alokasi Umum (kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1 PAD dan DAU Kabupaten Simalungun Tahun 2015-2017**

Tahun	PAD(Rp)	DAU(Rp)
2015	111,893,282,770	1,084,973,726,000
2016	119,980,274,859	1,230,816,187,000
2017	213,789,585,400	1,297,673,223,692

Sumber: *djpk.kemenkeu.go.id, 2019*

Dilihat pada tabel tabel 1.1 diatas, bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Simalungun pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya, demikian juga dengan jumlah penerimaan dari dana alokasi umum yang diperoleh dari pemerintah pusat yang selalu meningkat setiap tahun mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Dari data yang diperoleh diatas dapat memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah Kabupaten Simalungun dapat meningkatkan pengembangan pertumbuhan ekonominya lebih baik setiap tahunnya. Untuk melihat bagaimana kontribusinya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu adanya penelitian lebih lanjut karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor utama untuk mengetahui dan mengukur kemajuan serta kesejahteraan suatu kabupaten dan kota.

### A. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :Bagaimanakah kontribusi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Simalungun?

### B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Simalungun.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. LANDASAN TEORI

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets (2009:11) “pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya”. Dan menurut berbagai referensi pengertian pertumbuhan ekonomi adalah : Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Untoro, 2010:39). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses terjadinya kenaikan nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil, dengan kata

lain tumbuhnya perekonomian atau berkembang apabila terjadi pertumbuhan output riil disuatu daerah.

## 2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi skala nasional dapat diketahui dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk skala daerah menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan menurut Sukirno (2013:34) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan “jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah”. Tujuan PDB dan PDRB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu.

## 3. Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2013:34) faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah :

- a. Investasi  
Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
- b. Pertambahan barang modal  
Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
- c. Perkembangan teknologi  
Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Selanjutnya menurut Sukirno (2013:35) faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah dan menurut Sukirno (2013:35) pengeluaran pemerintah adalah suatu “tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Menurut Sukirno (2013:36) dalam mengambil keputusan, pemerintah memiliki banyak pertimbangan untuk mengatur pengeluaran, pemerintah tidak hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut. Besarnya penerimaan atau pendapatan pemerintah akan sangat mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah hal ini dikarenakan pendanaan pengeluaran pemerintah sendiri berasal dari pendapatan daerah atau pinjaman.

## 4. Hasil Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (dalam Siagian, 2018:13) hasil pertumbuhan ekonomi tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi di wilayahnya, begitu juga tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu wilayah tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Hasil pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kesempatan kerja, Perbaikan Distribusi Pendapatan dan Persiapan Bagi Tahapan Kemajuan.

## 5. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan direvisi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka berlaku juga kewenangan dalam pengelolaan sumber pendapatannya yang salah satunya adalah pengelolaan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan adanya kewenangan fiskal pada pemerintah daerah maka pemerintah daerah harus berpacu dalam meningkatkan jumlah penerimaan PAD karena dengan terus meningkatnya PAD maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa bergantung dengan pusat. Pemerintah daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi pada setiap tahunnya maka akan memberikan kontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan mencerminkan kinerja perekonomian suatu wilayah dimana pertumbuhan ekonomi mengindikasikan keberhasilan pembangunan suatu wilayah dan hal ini dapat diketahui dari besaran nilai *Product Domestic Regional Bruto (PDRB)*.

Sumber pendapatan lain selain PAD bagi daerah adalah dana perimbangan. Dana perimbangan yang terdiri dari komponen yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU dari pemerintah pusat adalah untuk pemerataan pembangunan agar tidak terjadinya kesenjangan dan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang terjamin kemudian baik.

## 6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan pendapatan asli dari daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Menurut Djaenuri (2012:88) pendapatan asli daerah adalah “Sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selanjutnya menurut Halim dan Kusufi (2012:96) pendapatan asli daerah adalah “Merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah”.

### a. Sumber Hukum dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai pembangunan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut.

Penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah yang maksimal diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah dan kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat yang, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Panggabean (2014) menyimpulkan bahwa terjadi *flypaper effect* pada

kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara yang sangat ketergantungan pada dana perimbangan.

#### **b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

1) Pajak daerah

Menurut Mardiasmo (2011:32) pajak daerah adalah “pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis objek pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota dibedakan menjadi :Objek pajak daerah provinsi dan Jenis objek pajak untuk kabupaten/kota.

2) Retribusi Daerah.

Menurut Darise (2011:136) retribusi daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah dibedakan antara menjadi :Jenis retribusi daerah provinsi dan Jenis retribusi daerah kabupaten/kota.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.

Menurut Halim dan Kusufi (2012: 98) kekayaan daerah yang dipisahkan adalah “Kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan secara mandiri oleh daerah”. Menurut Darise (2011:136) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.

c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Menurut Halim dan Kusufi (2012: 98) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang tidak dapat diklasifikasikan dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi” dan dana perimbangan ini bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang termasuk ke dalam dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

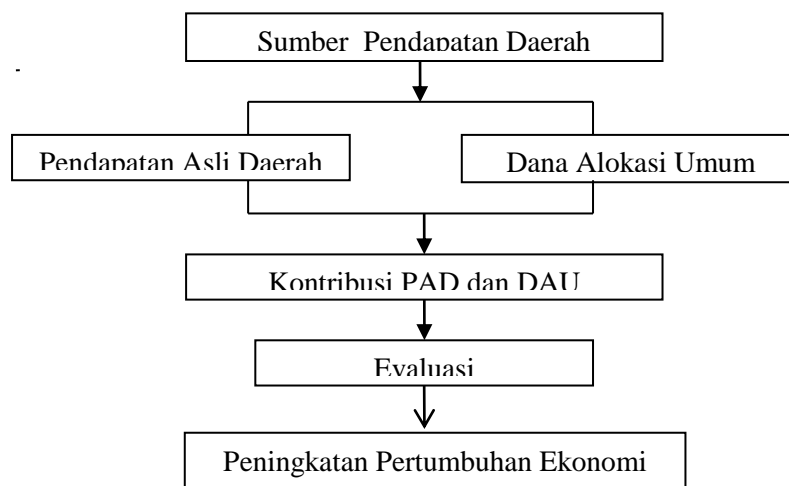
## 7. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang termasuk ke dalam dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut Djaenuri (2012:103) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dengan demikian akan terselenggara jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 bahwa ketentuan pelaksanaan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah ditetapkan sekurang-kurangnya 26 % dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN, kemudian Dana alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan masing masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas kemudian Dana alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan serta porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

### B. Kerangka Konseptual

Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah dan dengan sumber pendapatan ini bertujuan untuk menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi daerah selanjutnya untuk mendapatkan gambaran tentang PAD dan DAU, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka dibuatlah kerangka pemikiran pada gambar 2.1.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## III. METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:29) metode deskriptif “metode yang digunakan untuk menggambarkan atau

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

#### **A. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui :

a. Studi Pustaka

Yaitu data dikumpulkan dari buku teori, karya ilmiah, jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian melalui [www.simalungunkab.bps.go.id](http://www.simalungunkab.bps.go.id), dan [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data melalui dokumen tertulis terutama berupa dokumen, artikel, karya ilmiah dan buku-buku untuk mendapatkan data sekunder. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan djpk kemenkeu untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2015: 335) adalah “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015: 337) yaitu :

1. Pengumpulan informasi

Pengumpulan informasi melalui pengumpulan data dari djpk kemenkeu dan badan pusat statistik Simalungun.

2. Penyajian data

Sajian data merupakan rangkaian informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang disusun secara logis dan sistematis yang mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian. Sajian data merupakan deskripsi mengenai kondisi rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman atas gambaran fenomena yang ada pada obyek penelitian.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Data yang diperoleh sejak awal penelitian sebenarnya sudah merupakan suatu kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula belum jelas dan masih bersifat sementara, kemudian meningkat sampai pada tahap kesimpulan yang mantap, yaitu pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat karena telah melalui proses analisa data. Pada tahap ini adalah mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dari proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan

secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan dilapangan sehingga data dapat diuji validitasnya.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Hasil Penelitian

##### 1. Realisasi PAD dan DAU Kabupaten Simalungun Tahun 2015-2017

Jumlah realisasi PAD dan DAU selama 3 tahun mulai dari tahun 2015 -2017 Kabupaten Simalungun pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Realisasi PAD dan DAU Kabupaten Simalungun Tahun 2015-2017**

Tahun	PAD(Rp)	DAU(Rp)
2015	111,893,282,770	1,084,973,726,000
2016	119,980,274,859	1,230,816,187,000
2017	213,789,585,400	1,297,673,223,692

Sumber : [www.simalungunkab.go.id](http://www.simalungunkab.go.id)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, terlihat bahwa dari tahun 2015-2017 terjadi peningkatan PAD setiap tahunnya. Demikian juga pada jumlah DAU yang diterima pemerintah daerah kabupaten Simalungun mulai dari tahun 2015-2017 selalu meningkat.

##### 2. Tingkat Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten Simalungun

Jumlah pengeluaran per Kapita penduduk pemerintah kabupaten Simalungun mulai dari tahun 20015-2017 dapat dilihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Tingkat Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten Simalungun**

Pengeluaran Per Kapita	2015	2016	2017
Makanan	Rp.396.386,00	Rp 438.026,00	Rp 438.026,00
Non Makanan	Rp.305.387,00	Rp.329.137,00	Rp.329.137,00

Sumber : Data Sekunder, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, bahwa konsumsi penduduk kabupaten Simalungun pada tahun 2016 Rp 438.026 merupakan konsumsi makanan, sementara pada tahun 2015 mencapai Rp 396.386, hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi dari non makanan ke makanan sementara itu pada tahun 2017 data yang digunakan adalah data konsumsi tahun 2016. Peningkatan pengeluaran ini identik dengan peningkatan pendapatan penduduk.

##### 3. Kependudukan Kabupaten Simalungun

Data kependudukan masyarakat untuk pemerintah kabupaten Simalungun mulai dari jumlah penduduk, jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3 Jumlah Kepadatan Penduduk / Kecamatan**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
1	Silimakuta	15.777	7.994	7.783	102,71
2	Pamatang Silimahuta	10. 834	5.432	5.402	100,56
3	P u r b a	24. 027	12.109	11.918	101,60
4	Haranggaol Horison	5. 080	2.558	2.522	101,43
5	Dolok Pardamean	16. 201	8.193	8.008	102,31
6	Sidamanik	27. 676	13.620	14.056	96,90



7	Pamatang Sidamanik	16. 659	8.253	8.406	98,18
8	Girsang Sipangan bahbolon	14. 886	7.369	7.517	98,03
9	Tanah Jawa	47. 646	23.324	24.322	95,90
10	Hatonduhan	21. 366	10.782	10.584	101,87
11	Dolok Panribuan	18. 363	9.015	9.348	96,44
12	Jorlang Hataran	15. 667	7.769	7.898	98,37
13	P a n e i	22. 199	10.860	11.339	95,78
14	Panombeian Panei	19. 547	9.869	9.678	101,97
15	R a y a	32. 260	16.240	16.02	101,37
16	Dolok Silou	14. 411	7.277	7.134	102,00
17	Silou Kahean	17. 555	8.828	8.727	101,16
18	Raya Kahean	17. 830	9.011	8.819	102,18
19	Tapian Dolok	41. 154	20.845	20.309	102,64
20	Dolok Batu Nanggar	40. 663	20.555	20.108	102,22
21	S i a n t a r	66. 304	32.971	33.333	98,91
22	Gunung Malela	34. 767	17.245	17.522	98,42
23	Gunung Maligas	27.923	13.986	13.937	100,35
24	Hutabayu Raja	29.808	14.632	15.176	96,42
25	Jawa Maraja Bah Jambi	22. 021	10.800	11.221	96,25
26	Pamatang Bandar	31.679	15.584	16.095	96,83
27	Bandar Huluan	26. 473	13.264	13.209	100,42
28	B a n d a r	68. 958	34.051	34.907	97,55
29	Bandar Masilam	24. 876	12.325	12.551	98,20
30	Bosar Maligas	40. 591	20.322	20.269	100,26
31	Ujung Padang	41. 288	20.711	20.577	100,65
Kabupaten Simalungun		854. 489	425.794	428.695	99,32

Sumber : Data Sekunder, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, penduduk Kabupaten Simalungun atas dasar proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 854.489 jiwa yang terdiri atas 425.794 jiwa penduduk laki-laki dan 428.695 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Simalungun mengalami pertumbuhan sebesar 0,60 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,61 persen dan penduduk perempuan sebesar 0,59 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,32. Kepadatan penduduk di Kabupaten Simalungun tahun 2016 mencapai 195 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk / rumah tangga empat orang. Kepadatan Penduduk di 31 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Siantar dengan kepadatan sebesar 896 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Dolok Silou sebesar 48 jiwa/Km<sup>2</sup>.

#### 4.Sarana Pendidikan Pada Kabupaten Simalungun

Data sarana pendidikan yang ada di kabupaten Simalungun dimuai dari tingkat SD, SMP dan SMA (sederajat) dapat dilihat Pada tabel 4.4.

**Tabel. 4.4. Jumlah Sarana Pendidikan Pada Kabupaten Simalungun Dari Tingkat SDN, SMPN, SMUN dan SMKN**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Sekolah Negeri			
		SDN	SMPN	SMUN	SMKN
1	Silimakuta	12	2	1	-
2	Pamatang Silimahuta	12	1	-	-
3	P u r b a	26	3	1	-
4	Haranggaol Horison	10	-	-	-
5	Dolok Pardamean	22	2	1	-
6	Sidamanik	29	1	1	-
7	Pamatang Sidamanik	19	3	-	-
8	Girsang Sipangan Bolon	17	2	1	-
9	Tanah Jawa	44	3	1	-
10	Hatonduhan	23	2	-	-
11	Dolok Panribuan	35	4	1	-
12	Jorlang Hataran	16	3	-	1
13	P a n e i	25	1	-	-
14	Panombeian Panei	20	2	1	1
15	R a y a	50	4	1	2
16	Dolok Silou	23	1	1	-
17	Silou Kahean	21	2	1	-
18	Raya Kahean	23	2	1	-
19	Tapian Dolok	24	2	-	-
20	Dolok Batu Nanggar	31	1	1	-
21	S i a n t a r	35	2	1	1
22	Gunung Malela	23	2	-	-
23	Gunung Maligas	17	-	-	-
24	Hutabayu Raja	35	3	1	-
25	Jawa Maraja Bah Jambi	20	2	-	-
26	Pamatang Bandar	24	1	1	-
27	Bandar Huluan	19	1	2	-
28	B a n d a r	35	1	-	-
29	Bandar Masilam	18	2	-	-
30	Bosar Maligas	39	2	1	1
31	Ujung Padang	27	2	1	-
Kabupaten Simalungun		774	59	20	6

Sumber : Data Sekunder, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, sarana pendidikan yang tersedia di kabupaten Simalungun untuk tingkat SD negeri sebanyak 774 sekolah, pada tingkat SMP jumlah sekolah negeri yaitu 59 sekolah, berikutnya untuk tingkat SMA jumlah sekolah negeri sebanyak 20 sekolah dan tingkat SMK ada 6 sekolah SMK Negeri. Sebaran Sekolah Dasar Negeri (SDN) terbanyak berada di kecamatan Raya yakni sebanyak 50 Sekolah dan terkecil berada di kecamatan Silimakuta dan Pamatang Silimahuta masing-masing sebanyak 12 sekolah. Selanjutnya untuk SMP Negeri sebaran terbanyak berada d

kecamatan Dolok Panribuan dan kecamatan Raya masing-masing 4 SMP Negeri. Berikutnya untuk SMU Negeri terbanyak berada di kecamatan Bandar Hulan dan yang tidak memiliki SMU Negeri yakni kecamatan Pamatang Silimahuta, Haranggaol Horison, Pamatang Sidamanik, Hatonduhan, Jorlang Hataran, Panei, Tapian Dolok, Gunung Malela, Gunung Maligas, Jawa Maraja Bah Jambi, Bandar dan Bandar Masilam serta untuk SMK Negeri yang terbanyak hanya di kecamatan Raya yakni 2 Sekolah kemudian masing-masing hanya ada 1 SMK Mengeri di Kecamatan Jorlang Hataran, Panombeian Panei, Siantar dan Bosar Maligas.

## 5. Sarana Kesehatan Pada Kabupaten Simalungun

Tabel 4.5 Sarana Kesehatan Pada Kabupaten Simalungun

No	Nama Kecamatan	Sarana Kesehatan					
		RSU	Rumah Bersalin	Puskesmas	Pustu	Poskesdes	Posyandu
1	Silimakuta	-	-	1	2	3	19
2	Pamatang Silimahuta	-	-	1	2	1	21
3	P u r b a	-	-	1	6	6	38
4	Haranggaol Horison	-	-	1	1	5	16
5	Dolok Pardamean	-	-	1	6	6	31
6	Sidamanik	-	-	1	5	2	33
7	Pamatang Sidamanik	-	-	1	6	4	35
8	Girsang Sipangan Bolon	1	-	1	2	1	23
9	Tanah Jawa	1	-	1	7	4	66
10	Hatonduhan	-	-	1	6	2	37
11	Dolok Panribuan	-	-	1	8	3	43
12	Jorlang Hataran	-	-	1	2	3	33
13	P a n e i	-	-	1	4	3	56
14	Panombeian Panei	-	-	1	4	6	39
15	R a y a	1	-	1	10	9	67
16	Dolok Silou	-	-	1	7	4	23
17	Silou Kahean	-	-	1	6	5	33
18	Raya Kahean	-	-	1	5	2	37
19	Tapian Dolok	1	-	1	5	3	51
20	Dolok Batu Nanggar	1	-	1	7	4	59
21	S i a n t a r	-	-	2	5	2	33
22	Gunung Malela	-	-	1	5	7	41
23	Gunung Maligas	-	-	1	5	5	29
24	Hutabayu Raja	-	-	2	9	6	56
25	Jawa Maraja Bah Jambi	-	-	1	3	5	29
26	Pamatang Bandar	-	-	1	8	2	58
27	Bandar Hulan	-	-	1	5	2	48
28	B a n d a r	2	-	1	9	6	92
29	Bandar Masilam	-	-	1	4	5	43
30	Bosar Maligas	-	-	1	5	7	73
31	Ujung Padang	-	1	1	9	8	50

Sumber :Data Sekunder, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, sebaran Rumah Sakit Umum tidak merata namun Puskesmas sudah ada diseluruh kecamatan begitu juga pustu, poskesdes dan posyandu.

## 6. Infrastruktur Jalan

Data infrastruktur jalan yang di bangun dan digunakan di kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel 4.6.

**Tabel 4.6 Infrastruktur Jalan**

Panjang Jalan Kabupaten Simalungun	Keadaan Jalan			
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1,803,78	395,83	411,63	544,57	451,75

Sumber : Data Sekunder, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa panjang jalan kabupaten simalungun adalah 1,803, 78 Km yang dalam keadaan baik adalah 395,83 Km, dalam keadaan sedang adalah sepanjang 411,63 Km, sedangkan rusak sepanjang 544,57 Km serta yang rusak berat sepanjang 451,75 Km.

## 7. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun

Data pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel 4.7.

**Tabel 4.7**

**Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan**

Lapangan Usaha	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.7	4.9	4.7
Pertambangan dan Penggalian	7.9	3.1	7.9
Industri Pengolahan	2.8	4.7	2.8
Pengadaan Listrik dan Gas	8.5	4.2	8.5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7	3.8	7
Konstruksi	8.9	8.9	8.9
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6	6.7	6
Transportasi dan Pergudangan	7.2	7.3	7.2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.7	3.9	4.7
Informasi dan Komunika	5.5	5.6	5.5
Jasa Keuangan dan Asuransi	13.1	5	13.1
Real Estat	5.9	6	5.9
Jasa Perusahaan	4	4.1	4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.1	2.3	7.1
Jasa Pendidikan	6.5	7.1	6.5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.6	5.2	1.6
Jasa lainnya	6.2	6.8	6.2

Sumber : Data Sekunder, 2019

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, diketahui bahwa pada pertambangan penggalian mengalami penurunan pada tahun 2016, industri pengolahan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 2,8 dibandingkan pada tahun 2016 yang sebesar 4,7, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami penurunan

pada tahun 2017 sebesar 6 dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 6,7 penurunan terjadi 0,6, transportasi dan pergudangan mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan nilai sebesar 7,3 dibandingkan tahun sebelumnya yang bernilai 7,3, informasi dan komunikasi mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan nilai 5,5 dibandingkan nilai tahun sebelumnya yakni 5,6, jasa perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan nilai 4 dibandingkan nilai tahun sebelumnya sebesar 4,1, jasa pendidikan mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan nilai 6,5 dibandingkan tahun sebelumnya yakni 7,1, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya mengalami penurunan sangat signifikan pada tahun 2017 dengan nilai 1,6 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,2.

## B. Pembahasan

Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dari tahun 2015-2017 selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Simalungun lebih baik kedepannya. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan mendorong pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, pelayanan kesehatan, pendidikan serta lapangan pekerjaan. Beberapa faktor yang kurang perhatian dari pemerintah daerah yang diantaranya adalah perbaikan jalan sebagai akses utama bagi masyarakat, baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen. Jalan sebagai infrastruktur fisik adalah pendukung utama dalam menggerakkan perekonomian baik secara regional maupun nasional dan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Simalungun peran infrastruktur dalam kegiatan perekonomian sangat penting, dimana untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan stabil tentu harus diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien.

Berikutnya selain kualitas dan ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai maka perhatian yang tidak kalah pentingnya juga kepada ketersediaan sumber daya manusia atau tenaga kerja handal serta memiliki produktifitas yang baik, hal ini tentu harus didukung dengan pembekalan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja melalui pemerataan pendidikan kejuruan, berdasarkan hasil yang diperoleh diketahui bahwa sekolah menengah kejuruan di Simalungun hanya berjumlah 6 Sekolah, dari dan alokasi khusus yang diberikan seharusnya dapat memberikan peningkatan jumlah sekolah kejuruan karena terindikasi bahwa banyak pengusaha menggunakan tenaga kerja dari luar daerah kabupaten simalungun.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah Kabupaten Simalungun dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum pada tahun 2015-2017 selalu mengalami peningkatan yang memberikan dampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun, akan tetapi kurangnya perhatian pemerintah kabupaten Simalungun akan perbaikan infrastruktur jalan, sehingga hasil realisasi PAD dan Dana alokasi Umum yang besar relatif kurang mampu memadai dalam pembiayaan proses pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan masih banyak rusak dan rusak parah yang digunakan sebagai akses utama.
2. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memberikan kontribusi pada pemerataan pendidikan terutama pada pembangunan sekolah kejuruan.

3. Besarnya pertumbuhan ekonomi pada beberapa lapangan usaha mengalami penurunan hal ini diindikasikan karena akses jalan yang rusak dan rusak parah serta terjadinya penurunan produktifitas angkatan kerja.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Simalungun diharapkan memperhatikan perbaikan jalan sebagai akses utama masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas.
2. Pemerintah daerah kabupaten Simalungun harus memperhatikan pemerataan pendidikan terutama pendidikan semua tingkat karena pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun sebuah kemajuan suatu daerah, terutama pada tingkat kejuruan sebagai peningkatan produktifitas angkatan kerja dalam mengurangi tingkat pengangguran disuatu daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Rudi. (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Darise, Nurlan. (2011). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Djaenuri, Aries. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: teori konsep dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuznets, Simon, 1995, dalam Purnamasari, 2009. "Economic Growth and Income Inequality". *American Economic Review*
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Panggabean, FY. (2014). *Flypaper Effect Pada Unconditional Grant Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/41224>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed method)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2013). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: Bina Grafika.
- Siagian, Erlinda. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016*. Yogyakarta: UNY.
- Untoro, Joko. (2010). *Ekonomi*. Jakarta: Kawah Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah .
- [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)
- [www.simalungunkab.go.id](http://www.simalungunkab.go.id)